

BAB V

EVALUASI KEADAAN TAHUN 2005 DAN 2006

APBD Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan sesuai dengan sistem pengelolaan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun landasan hukum yang digunakan adalah Undang-Undang No. 17 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000, serta Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2001.

Secara umum pelaksanaan APBD 2005 dan 2006 adalah sebagai berikut, realisasi pelaksanaannya terutama dari sisi belanja belum sesuai dengan target dan sasaran yang telah ditetapkan baik untuk anggaran tahun 2005 maupun anggaran 2006 yang sedang berjalan. Dari sisi pendapatan, pada tahun 2005 terjadi pelampauan pendapatan sebesar Rp 1,02 triliun atau mencapai 108,23 persen dari anggaran, sementara realisasi pendapatan tahun 2006 sampai dengan bulan Juni baru mencapai 41,11 persen dari penetapan. Dari sisi belanja, realisasi penyerapan APBD tahun 2005 sampai dengan Desember mencapai 87,52 persen, dan penyerapan tahun 2006 sampai dengan bulan Juni mencapai 25,29 persen.

A. Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta

Realisasi pendapatan daerah tahun 2005 adalah sebesar Rp. 13,46 triliun atau telah melampaui target anggaran sebesar Rp 1,02 triliun dari perubahan anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp. 12,44 triliun. Pelampauan anggaran tersebut diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) utamanya pajak daerah dan Dana Perimbangan bagi hasil pajak.

**Tabel V.1. Realisasi Penerimaan Daerah Provinsi DKI Jakarta
Menurut Komponen Penerimaan Januari – Desember 2005 (Miliar Rp.)**

SUMBER PENDAPATAN	ANGGARAN	REALISASI	(3):(2) (%)
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	7.073,74	7.585,06	107,22
Pajak Daerah	6.115,19	6.499,78	106,29
Retribusi Daerah	372,95	419,67	112,53
Hasil Perusahaan Milik Daerah	103,4	103,22	99,83
Lain-lain Pendapatan	482,20	562,46	116,47
Dana Perimbangan	5.256,26	5.770,01	109,77
Bagi Hasil Pajak	4.393,24	4.858,54	104,11
Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA	90.000	138,45	153,83
Dana Alokasi Umum	773,02	773,03	100,00
Dana Alokasi Khusus	0,00	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan yang sah	109,06	109,06	100,00
Pendapatan Daerah	12.439,06	13.464,13	108,23

Sumber: Biro Keuangan Provinsi DKI Jakarta

PAD sebagai kontributor terbesar dalam pendapatan daerah mampu melampaui target sebesar 107,22 persen dari anggaran. Pelampauan ini pada dasarnya tidak lepas dari beberapa faktor yang ikut mempengaruhi seperti faktor kebijakan dalam upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah, faktor kesadaran hukum masyarakat yang semakin tumbuh tentang makna pentingnya pajak dan retribusi dalam pembangunan daerah, dan faktor kerja keras untuk meningkatkan PAD yang telah dilakukan oleh petugas-petugas pemungut di lapangan.

Sementara pendapatan daerah yang berasal dari dana perimbangan melampaui target sebesar 109,77 persen. Pendapatan dari bagi hasil pajak maupun bukan pajak masing-masing melampaui target 104,11 persen dan 153,83 persen. Sedangkan pendapatan dari Dana Alokasi Umum sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Pelampauan dana perimbangan yang merupakan bagian dari pendapatan Pemerintah Pusat tidak dapat lepas dari upaya pemerintah daerah dalam melakukan koordinasi dan kerja sama yang intensif dengan instansi terkait.

Tabel V.2. Realisasi Penerimaan Daerah Provinsi DKI Jakarta Menurut Komponen Penerimaan, Januari – Juni 2006 (Miliar Rp.)

SUMBER PENDAPATAN	APBD 2006 (Penetapan)	REALISASI	(3):(2) (%)
1	2	3	4
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	8.597,50	3.675,21	42,75
Pajak Daerah	7.400,00	3.173,92	42,89
Retribusi Daerah	440,34	145,39	33,02
Hasil Perusahaan Milik Daerah	129,78	17,08	13,16
Lain-lain Pendapatan	627,38	338,82	54,01
Dana Perimbangan	6.384,00	2.526,35	39,57
Bagi Hasil Pajak	5.512,00	2.084,62	37,82
Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA	100	57,28	57,28
Dana Alokasi Umum	772	384,45	49,80
Dana Alokasi Khusus	0	0	0,00
Lain-lain Pendapatan yang sah	109,06	2,06	1,89
Pendapatan Daerah	15.090,56	6.203,62	41,11

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta

Pada tahun 2006, penetapan pendapatan sebesar Rp 15.090,56 miliar, yang terdiri dari: Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 8.597,50 miliar; Dana Perimbangan sebesar Rp. 6.384,00 miliar; dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp. 109,06 miliar. Realisasi pendapatan tahun 2006 hingga bulan Juni mencapai Rp. 6.203,62 miliar atau sebesar 41,11 persen dari penetapan, dengan pencapaian terbesar diperoleh dari PAD yaitu Rp. 3.675,21 miliar. Selanjutnya, pendapatan dari Dana Perimbangan mencapai Rp.2.526,35 miliar dan Lain-lain Pendapatan yang sah sebesar Rp. 2,06 miliar.

Bila dibandingkan dengan tahun 2005 pada kurun waktu yang sama maka realisasi pendapatan tahun 2006 sedikit mengalami penurunan. Hal ini disebabkan adanya perlambatan ekonomi secara makro pada semester pertama akibat adanya kebijakan pemerintah pusat menaikkan harga BBM pada triwulan terakhir tahun 2005. Disamping itu nilai tukar dan harga minyak dunia yang belum stabil juga mempengaruhi kinerja perekonomian daerah dan sumber-sumber pendapatan daerah.

Dampak yang paling terlihat adalah penurunan pendapatan daerah yang bersumber dari PAD, namun demikian pemerintah daerah akan berupaya dalam memenuhi target anggaran dengan meningkatkan sumber penerimaan daerah melalui ekstensifikasi PAD, Bagi Hasil Pajak, dan Dana Perimbangan yang lebih proporsional.

B. Penyerapan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta

Penyerapan belanja daerah tahun 2005 belum dapat memenuhi target anggaran dengan realisasi belanja 2005 sebesar Rp. 12,43 triliun atau sebesar 87,52 persen yang mampu terserap oleh kegiatan pembangunan.

Tabel V.3. Penyerapan Belanja Daerah Menurut Bidang Pembangunan Januari - Desember 2005 (Miliar Rp.)

No.	BIDANG PEMBANGUNAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(3):(2) (%)
	(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Hukum, Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Kesatuan Bangsa	645,96	572,86	88,68
2.	Pemerintah	3.607,56	3.049,28	84,52
3.	Ekonomi	539,34	526,98	97,71
4.	Pendidikan dan Kesehatan	3.701,24	3.490,69	94,31
5.	Kependudukan dan Ketenagakerjaan	179,74	163,20	90,80
6.	Sosial Budaya	956,89	832,83	87,04
7.	Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	843,50	769,36	91,12
8.	Sarana dan Prasarana Kota	3.734,18	3.030,15	81,15
JUMLAH		14.208,41	12.435,35	87,52

Sumber: Biro Keuangan Provinsi DKI Jakarta

Menurut bidang pembangunan, penyerapan belanja 2005 terbesar dicapai oleh bidang ekonomi (97,71 persen) dan yang terendah adalah bidang sarana dan prasarana kota (81,15 persen). Kurangnya

penyerapan belanja pada umumnya terjadi pada kegiatan fisik yang memerlukan proses administrasi lebih rumit.

Sementara penyerapan belanja untuk tahun 2006 sampai dengan bulan Juni mencapai Rp. 4.497 miliar dari total penetapan sebesar Rp. 17.781 miliar. Dengan demikian realisasi penyerapan baru mencapai 25,29 persen atau sedikit lebih rendah dibandingkan dengan penyerapan pada periode yang sama tahun 2005 sebesar 26,25 persen. Penyerapan belanja yang masih rendah ini pada umumnya terjadi pada kegiatan-kegiatan fisik berskala besar yang proses administrasi dan penyediaan lahannya membutuhkan waktu relatif lama.

Penyerapan belanja terbesar menurut bidang pembangunan adalah belanja kependudukan dan ketenagakerjaan, yaitu sebesar 35,23 persen, sedangkan yang terkecil adalah belanja bidang Sarana dan Prasarana Kota, sebesar 10,57 persen (Tabel V.4).

Tabel V.4. Penyerapan Belanja Daerah Menurut Bidang Pembangunan Januari - Juni 2006 (Miliar Rp.)

No.	BIDANG PEMBANGUNAN	JAN - JUNI 2006		
		PENETAPAN	REALISASI	(%)
	(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Hukum, Ketenteraman, Keterlibatan Umum dan Kesatuan Bangsa	696,81	193,70	27,80
2.	Pemerintah	4.427,09	1.352,34	30,55
3.	Ekonomi	753,90	169,28	22,45
4.	Pendidikan dan Kesehatan	4.960,30	1.637,19	33,01
5.	Kependudukan dan Ketenagakerjaan	212,85	74,98	35,23
6.	Sosial Budaya	919,83	279,53	30,39
7.	Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	1.166,04	299,43	25,68
8.	Sarana dan Prasarana Kota	4.644,62	490,90	10,57
JUMLAH		17.781,44	4.497,36	25,29

Sumber: Biro Keuangan Provinsi DKI Jakarta

C. Program Dan Kegiatan Prioritas Tahun 2005 dan 2006

Belanja Daerah tahun 2005 dan 2006, selain dikenal adanya struktur program menurut 8 (delapan) bidang pembangunan (Renstrada) juga dikenal adanya *Dedicated Program* (Program Prioritas) yang merupakan kegiatan yang bersifat strategis dan berskala besar.

1. Program Dan Kegiatan Prioritas Tahun 2005

APBD tahun 2005 lebih difokuskan pada pelaksanaan kegiatan skala besar dan prioritas (*dedicated program*). Adapun kegiatan yang dikategorikan ke dalam belanja *dedicated program* beserta beberapa pertimbangannya, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. **Banjir Kanal Timur (BKT)**, berupa pembebasan lahan dengan pertimbangan bahwa kebutuhan biaya keseluruhan pembebasan tanah yang harus ditanggung Pemprov seluas 401,2 ha, sementara sampai akhir tahun 2004 baru mencapai 36 ha.
- b. **Busway**, didasarkan pada pertimbangan bahwa kebutuhan terhadap tersedianya angkutan massal yang aman, nyaman dan terjangkau sudah sangat mendesak mengingat semakin menurunnya kondisi lalu lintas di Kota Jakarta.
- c. **Pembangunan Rumah Susun**, didasarkan pada tujuan untuk menyediakan perumahan rakyat yang sederhana, murah dan sehat.
- d. **Flyover dan Underpass**, didasarkan mengurangi simpul kemacetan di perempatan sebidang dan tidak sebidang.
- e. **Rehab total gedung sekolah**, dengan pertimbangan bahwa terdapat sejumlah SDN, SMPN dan SMAN/SMKN yang dikategorikan rawan ambruk.
- f. **Pelestarian Kali Angke, Kali Ciliwung dan Situ-situ**, didasarkan pada keinginan kuat Pemerintah Daerah untuk mewujudkan kali dan situ yang tertata baik dan sehat serta mampu menjalankan fungsinya bagi lingkungan kehidupan kota.

- g. **Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK)**, dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun ketahanan sosial-ekonominya secara mandiri, sehingga dapat mewujudkan suatu *civil society* yang lebih nyata.
- h. **Tambahan Kesra Guru, Paramedis dan Pegawai**, dimaksudkan sebagai upaya terus menerus Pemda dalam memperbaiki kesejahteraan para guru, paramedik dan pegawai diikuti dengan keharusan pegawai untuk mampu meningkatkan produktivitas dan kinerjanya, sekaligus upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*).
- i. **Penguatan Manajemen Kecamatan dan Kelurahan**, dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan dan peran kecamatan dan kelurahan dalam mengelola pelayanan masyarakat secara langsung dan lebih bertanggung jawab.
- j. **Islamic Center**, dimaksudkan sebagai upaya untuk membangun pusat ke-Islaman yang besar sebagai pusat kegiatan dan pustaka ilmu ke-Islaman.
- k. **Penghijauan**, didasarkan pada kebutuhan pelayanan untuk menghadirkan kenyamanan lingkungan perkotaan yang dinilai sangat strategis dalam meningkatkan citra Ibukota Jakarta, melalui penataan dan pengindahan infrastruktur perkotaan khususnya pertamanan.

Sementara kegiatan prioritas tahun 2005 menurut bidang pembangunan adalah sebagai berikut :

a. Bidang Hukum, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Kesatuan Bangsa

1) Fungsi Hukum

Terlaksananya sosialisasi produk hukum daerah melalui media massa, melalui radio/televisi, *website* Pemda DKI dan juga melalui dialog publik dengan masyarakat, tersedianya bantuan dan pelayanan hukum bagi masyarakat miskin, meningkatnya koordinasi dengan para penegak hukum, terlaksananya

pelatihan peningkatan kapasitas bagi aparat penegak hukum daerah, dan meningkatnya jumlah bantuan perlindungan hukum kepada aparat/unit.

2) Fungsi Ketenteraman Ketertiban dan Penanggulangan Bencana

Tersusunnya peta kerawanan sosial dan tersedianya kebutuhan banpol/linmas, meningkatnya jumlah penertiban pelanggaran perda dan operasi bersih, meningkatnya kualitas dan kuantitas banpol/linmas dengan rasio 1:1500, terbinanya kesiapan potensi masyarakat dalam rangka pengendalian dan pemantauan di sejumlah titik rawan bencana, meningkatnya jumlah balakar di masyarakat, meningkatnya "*respons time*" aparat di lapangan terhadap kejadian bencana, tersedianya sarana dan prasarana pemadam kebakaran yang sesuai kebutuhan.

3) Fungsi Kesatuan Bangsa

Meningkatnya partisipasi masyarakat Jakarta dalam menciptakan stabilitas keamanan ibukota, meningkatnya semangat kebangsaan dan ketahanan masyarakat Jakarta, meningkatnya hubungan Eksekutif dengan Legislatif dalam penanganan masalah politik, terwujudnya kesadaran masyarakat terhadap disintegrasi bangsa dan terbinanya hubungan antar lembaga.

b. Bidang Pemerintahan

1) Fungsi Pemerintahan Umum

Tersusunnya materi masukan dan sinkronisasi peraturan perundangan yang berkaitan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah baik dalam rangka perumusan maupun penyempurnaan peraturan perundangan yang terkait, terlaksananya sosialisasi pelimpahan kewenangan wilayah kepada aparat SKPD terkait

di tingkat provinsi, kotamadya/kabupaten, kecamatan dan kelurahan

2) Fungsi Aparatur

Tersusunnya rumusan standar kompetensi spesifik pada SKPD (dinas, badan, biro, dan kantor), tersedianya sistem promosi dan mutasi jabatan yang obyektif dan transparan, serta tersusunnya kurikulum dan modul diklat berbasis kompetensi melalui analisis kebutuhan diklat.

3) Fungsi Perencanaan dan Pengawasan

Tersusunnya pedoman perencanaan berjenjang, terwujudnya sistem informasi perencanaan provinsi dan terintegrasi di 5 (lima) wilayah (*online system*), dan tersedianya laporan hasil pengawasan/pemeriksaan reguler serta evaluasi tindak lanjut.

4) Fungsi Pengelolaan Keuangan Daerah

Tersusunnya manajemen keuangan daerah, tersusunnya rencana keuangan daerah, tersusunnya sistem akuntansi keuangan daerah, tersusunnya SIMKEU daerah, pengakuntansian dan penyusunan perhitungan anggaran dan LPJ, serta terlaksananya sistem monitoring keuangan daerah.

5) Fungsi Sistem Informasi

Terwujudnya SIM terpadu lintas bidang yang berbasis *web*, tersedianya informasi pemerintah daerah yang mutakhir, terlaksananya kegiatan perangkat keras dan perangkat jaringan di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan tersusunnya rencana implementasi *Master Plan* Teknologi Informasi.

c. Bidang Ekonomi

1) Fungsi Pariwisata

Terselenggaranya kegiatan *Enjoy Jakarta Golf, Dining, Shopping, Marine and Island*, terselenggaranya sosialisasi

brand pariwisata Jakarta, terselenggaranya kegiatan pembinaan polisi pariwisata, terselenggaranya workshop ISO 9000 bagi pengelola industri pariwisata, terlaksananya penataan PIK Pulogadung sebagai kawasan pariwisata, terselenggaranya atraksi di Anjungan DKI Jakarta TMII, terlaksananya standarisasi pelayanan di obyek wisata dan terlaksananya penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA).

2) Fungsi Industri dan Perdagangan

Terlaksananya pelatihan persiapan sertifikasi ISO 9001-2000 perusahaan Industri, Logam, Mesin, Elektronik dan Aneka, terlaksananya penerapan fasilitator ISO 9001-2000 dan penerapan ISO 9001-2000, terlaksananya regulasi pasar ritel modern di DKI Jakarta, terlaksananya sosialisasi certificate of origin ASEAN/China/India, terlaksananya pemeliharaan status akreditasi laboratorium uji balai bahan/balai kerajinan, terlaksananya kegiatan pengembangan wawasan staf, terlaksananya monitoring perusahaan Industri dan Perdagangan yang mengimplementasikan dokumen pengelolaan lingkungan, terlaksananya tera dan tera ulang timbangan elektronik dan mekanik, terlaksananya verifikasi standar ukuran, terlaksananya pemeliharaan/rehab gedung Balai Bahan dan Barang Teknik, dan terlaksananya pengadaan peralatan uji laboratorium Balai Bahan.

3) Fungsi Pengembangan Usaha Daerah

Terlaksananya pelatihan teknis Sumber Daya Manusia PD/BUKD/PT Patungan tahun 2004 sebanyak 40 orang dan tahun 2005 sebanyak 42 orang, terlaksananya pemutahiran data aset yang potensial untuk dikerjasamakan dengan pihak ketiga tahun 2004 sebanyak 6 aset dan tahun 2005 sebanyak 3 aset, terevaluasinya pelaksanaan perjanjian kerjasama pemanfaatan aset daerah tahun 2005 sebanyak dua perjanjian kerjasama.

4) Fungsi Usaha Kecil, Menengah Dan Koperasi

Tersusunnya informasi kondisi penampungan PKL/USIT, tertatanya usaha skala mikro, terbentuknya LKM sebanyak 50 unit, dan tersedianya sertifikasi usaha skala mikro.

5) Fungsi Peternakan, Perikanan Dan Kelautan

Terlaksananya pematangan tanah di rumah pemotongan hewan (RPH) Babi Kapuk seluas 1,7 ha, kursus juru mudi kapal penangkap ikan lepas pantai sebanyak 40 orang, koordinasi dan supervisi pelayanan kesehatan hewan, serta pemeriksaan kesehatan pemotongan hewan.

6) Fungsi Pertanian Dan Kehutanan

Pengadaan tanaman *instant* penghijauan di permukiman, penanaman, pengurugan dan pembangunan instalasi pengairan di Kebun Buah Cengkareng, kerjasama dengan daerah produsen hasil hutan, pengawasan peredaran hasil hutan di *checkpoint*, serta rehabilitasi lahan dan hutan mangrove Tol Sedyatmo.

d. Bidang Pendidikan dan Kesehatan

1) Fungsi Pendidikan

Terlaksananya identifikasi dan analisa serta penyusunan data penyebab anak putus sekolah (1.187 siswa SD dan 2.263 siswa SMP), termasuk didalamnya anak usia sekolah yang bekerja, tersusunnya Perda Sisdikda (Wajar 9 Tahun) yang juga memuat mekanisme pembiayaan bagi siswa tidak mampu, dewan pendidikan, komite sekolah, dan guru perbantuan.

2) Fungsi Kesehatan

Meningkatnya *case detection rate* TBC menjadi 70 persen, meningkatnya angka kesembuhan pengobatan TBC 85 persen, meningkatnya prosentase kelurahan UCI 100 persen,

meningkatnya prosentase darah PMI yang dilakukan *screening* HIV/AIDS, menurunnya IR DBD menjadi 30/100.000 dari 50/100.000, meningkatnya peran serta masyarakat dalam pencegahan penyakit menular, tersedianya Puskesmas yang mampu melayani kasus narkoba, menurunnya kunjungan gangguan jiwa di Puskesmas dan RS 3 persen, meningkatnya cakupan pemberian Vitamin A pada Bayi sebesar 90 persen, meningkatnya status gizi balita dengan D/S sebesar 60 persen, meningkatnya status gizi ibu hamil, meningkatnya keluarga pengguna jamban sehat menjadi 75 persen, meningkatnya keluarga pengguna air bersih menjadi 80 persen, berkurangnya jumlah jentik nyamuk, meningkatnya jumlah pelatihan berdasarkan program prioritas, meningkatnya *respons time* dan *screening* penyakit potensial KLB berbasis rumah sakit dengan median 24 jam, serta meningkatnya *respons time* penyakit potensial KLB berbasis rumah sakit dengan median 24 jam.

e. Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan

1) Fungsi Kependudukan

Terlaksananya pendataan penyebaran penduduk, penyusunan peta demografi di Provinsi DKI Jakarta dan penyuluhan akta-akta catatan sipil di Kepulauan Seribu, pemeliharaan operasionalisasi aplikasi SIMDUK, pembuatan sinetron kependudukan, pengadaan alat penyimpanan registrasi akta, pengadaan perangkat dokumen akta catatan sipil.

2) Fungsi Ketenagakerjaan

Terlaksananya *expo* bursa kerja dua kali setahun, terlaksananya sosialisasi, penyuluhan, pendaftaran, seleksi, pelatihan, transmigrasi, dan mengoptimalkan tenaga kerja dari wilayah DKI Jakarta dengan mengutamakan masyarakat sekitar perusahaan dan tetap memperhatikan kualitas dan kompetensi.

f. Bidang Sosial dan Budaya

1) Fungsi Keagamaan

Penetapan *master plan* tempat ibadah di Prov. DKI Jakarta, penyusunan dan penetapan mekanisme penyelesaian masalah yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama, koordinasi lintas sektor bidang keagamaan, penyelenggaraan MTQ tuna netra Provinsi, penataran 150 kader mubalig tingkat lanjutan, penyusunan pedoman dan publikasi pembinaan mental spiritual untuk PMKS, penyelenggaraan lokakarya keagamaan, sosialisasi dan pengawasan pelaksanaan SK Gub.1571/2002, 137/2002, 145/2002, bina potensi *mualaf* dan pemberdayaan potensi guru ngaji.

2) Fungsi Kesejahteraan Sosial

Bimlat tingkat lanjutan kemandirian yang meliputi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) jalanan, komunitas potensi rawan PMKS jalanan, anak terlantar, anak jalanan, remaja bermasalah, lansia terlantar potensial, panca indra. Pembuatan pedoman asistensi keluarga miskin, bimbingan dan penyantunan panca tubuh tingkat lanjutan, penertiban PMKS jalanan dan pemulangan ke daerah asal, pengawasan dan pengendalian pembinaan kegiatan kesejahteraan anak, remaja, keluarga dan lansia, pemberian perawatan dan penyantunan WBS serta penyaluran penyandang cacat ganda asal DKI Jakarta di Yayasan Bhakti Luhur Malang sebanyak 50 orang, penyusunan *master plan* dan pedoman pola pelayanan PMKS psikotik, pembangunan panti sosial asuhan anak di Cengkareng, perencanaan pembangunan PSTW BM2 Cengkareng dan pelayanan pemakaman WBS panti sosial/non panti.

3) Fungsi Pemberdayaan Masyarakat

Terlaksananya penyuluhan terpadu bina ketahanan masyarakat dalam penanggulangan bencana di enam wilayah

kota/kabupaten, terlaksananya pemantauan dan evaluasi penanggulangan kemiskinan, serta terlaksananya pengembangan koran komunitas di 25 kelurahan.

4) Fungsi Pelestarian Budaya dan Permuseuman

Terlaksananya penyusunan dan perancangan naskah direktori galeri di Jakarta, inventarisasi sejarah lokal di lima wilayah DKI Jakarta, penetapan produk hukum tentang pengaturan benda cagar budaya dan pertunjukan seni budaya di DKI Jakarta, karnaval Jakarta tahun 2005, serta pembinaan kegiatan seni budaya.

5) Fungsi Kepemudaan dan Olahraga

Terlaksananya seleksi dan pengiriman pemuda pelopor tingkat Provinsi DKI Jakarta menuju tingkat Nasional, seleksi pertukaran pemuda antar negara (Asean, Canada, Australia dan Jepang), Jambore Daerah menuju Jambore Nasional 2006, dan penyusunan *master plan* kepramukaan di DKI Jakarta.

g. Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan

1) Fungsi Sumber Daya Alam

Terkendalinya pemakaian air bawah tanah, terbangunnya *Reserve Osmosis* di Kecamatan Cengkareng dan Penjaringan, sumur bor di Kecamatan Makasar dan Ciracas, 160 titik sumur resapan di 2 wilayah Kotamadya, dan tersedianya data muka air tanah dari sumur pantau wilayah DKI Jakarta.

2) Fungsi Lingkungan Hidup

Terlaksananya pembangunan taman seluas 22.000 M², terlaksananya pembangunan jalur hijau seluas 12.800 M², terlaksananya penataan taman seluas 838.300 M², terlaksananya penataan jalur hijau seluas 80.000 M², terlaksananya refungsi taman/jalur hijau seluas 6.800 M², terlaksananya pemeliharaan taman kota seluas 733.000 M², terlaksananya pemeliharaan jalur hijau kota seluas 1.242.800

M², terlaksananya penataan pedestrian seluas 1.000 M², terlaksananya pemagaran *flyover* seluas 455 M², dan terlaksananya penanaman pohon sebanyak 96.846 batang.

3) Fungsi Kebersihan

Terlaksananya pengangkutan dan pengelolaan sampah dari Tempat Penampungan Sementara (TPS) ke Stasiun Peralihan Antara (SPA) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bantar Gebang, serta terlaksananya pengolahan dan pengangkutan air kotor dari sumber ke Instalansi Pengolahan Air Kotor (IPAK).

h. Bidang Sarana dan Prasarana Kota

1) Fungsi Kelengkapan Kota

Tertatanya jaringan listrik gas, air bersih serta air limbah, bertambahnya jumlah dan kualitas titik lampu penerangan jalan dan tempat umum, meningkatkan pemeliharaan dan pengembangan jaringan air limbah buangan pabrik, pertokoan, restoran dan meningkatnya mutu pelayanan air bersih.

2) Fungsi Tata Air

Terbangunnya sistem pengendali banjir antara lain rumah pompa dan pompa Waduk Sunter Utara, Waduk Pluit, Waduk Grogol dan Pulomas, serta *junction* Tol Sedyatmo, saringan sampah Waduk Pluit, Kali Sekretaris dan Kali Sunter Perintis Kemerdekaan, tersedianya *Early Warning System* untuk peringatan dini terjadinya banjir yang berada di hulu dari sungai-sungai yang melewati Jakarta, terlaksananya kegiatan *dedicated* program pembebasan tanah Banjir Kanal Timur luasnya sekitar 44 ha, terlaksananya layanan pembersihan saluran di tiga sistem aliran yang melewati DKI Jakarta, serta operasional dan pemeliharaan sarana prasarana pengendali banjir.

3) Fungsi Perhubungan

Terlaksananya perbaikan darurat ringan dan ringan (tutup lubang) di lima wilayah DKI Jakarta, tersedianya lahan jalan untuk jalan dan jembatan pada busway koridor 2 dan 3, terlaksananya kegiatan peningkatan jalan dan jembatan pada busway koridor 2 dan 3, terselesaikannya pembangunan 1 underpass (UP. Senen) serta dimulainya pembangunan 1 underpass (UP. Kebayoran Lama) dan 2 flyover (FO. Roxy dan FO. Martadinata), terlaksananya kegiatan peningkatan jalan dan jembatan (arteri, kolektor dan lokal), tersedianya lahan untuk jalan dan jembatan arteri/kolektor dan lokal, tersedianya fasilitas trotoar, tersedianya *excavator* standar dan terpeliharanya alat-alat besar, tersedianya angkutan umum busway koridor 2 dan 3, terkendalinya lalu lintas dan angkutan di jalur busway, dan terbangunnya Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP).

4) Fungsi Perumahan dan Permukiman

Tersedianya perencanaan rusun 4 lokasi dan amdal rusun 6 lokasi, tersedianya rusun sewa baru 1.480 unit, tersedianya lahan baru untuk pembangunan rusun seluas 150.278 M2, tersedianya lahan yang telah diurug seluas 26.371 M3, serta perbaikan rusun di 6 lokasi, tersedianya rumah susun sewa dan dikelola dengan nilai subsidi tepat menjangkau target sasaran.

5) Fungsi Tata Ruang

Tersusunnya peraturan perangkat insentif dan disinsentif dalam implementasi rencana tata ruang (Keputusan Gubernur), terlaksananya kajian kawasan dan lingkungan di 5 lokasi, tersedianya metode dan materi sosialisasi dan pembinaan tentang perencanaan kota pada tingkat seksi DTK kecamatan, suku dinas dan Dinas Tata Kota, tersedianya data dasar perencanaan untuk kebutuhan penataan ruang dan pelayanan masyarakat.

6) Fungsi Tata Bangunan

Terbangun dan beroperasinya gedung Blok B (6 lantai) dari 16 lantai yang direncanakan dan gedung serba guna/annex (2 lantai), lengkap dengan *meubelair* dan sarana luarnya Kantor Walikotaamadya Jakarta Barat dan Kantor Walikotaamadya Jakarta Utara, terbangun dan beroperasinya gedung utama (8 lantai) dan bangunan penunjang lainnya (gedung serbaguna, gudang, gedung cek fisik, Satlantas) Kantor Samsat dan Sudin Pendapatan Daerah Kotamadya Jakarta Utara, tertata serta terjaminnya pengoperasian sistem dan peralatan mekanikal dan elektrikal serta tertanggulangnya kebocoran terowongan Tugu Monas dalam rangka peningkatan keamanan dan kenyamanan pengunjung maupun struktur tanah dan bangunan Tugu Monas.

2. Program dan Kegiatan Prioritas 2006

Penyusunan APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2006 lebih difokuskan pada upaya mempercepat pencapaian sasaran Renstrada 2002-2007 dan indikator kinerja sebagaimana diamanatkan dalam RKPD Tahun 2006 melalui *Dedicated Program*, kegiatannya meliputi: lanjutan pembebasan lahan Banjir Kanal Timur (BKT), pembangunan Busway Koridor 4, 5, 6, 7, *Traffic Management* prakonstruksi, pembebasan tanah dalam rangka pembangunan *Mass Rapid Transit* (MRT)/Subway, pembangunan/penyelesaian *Flyover* dan *Underpass* (FO/UP) secara bertahap, normalisasi enam lokasi sungai/kali, lima lokasi situ dan penataan sistem saluran, pengerukan dan pembangunan dermaga Muara Angke dan Jakarta *New Port*, pembangunan rumah susun dan perbaikan kampung di lima kawasan Kotamadya, penyediaan lokasi dalam rangka penataan kaki lima dan pembangunan terminal agribisnis, pembangunan hutan kota, taman kota dan taman interaktif di lima wilayah Kotamadya, lanjutan pemberian dana *block grant* PPMK sebesar Rp500 juta/kelurahan, peningkatan kualitas pelayanan publik Kelurahan, peningkatan kualitas pelayanan publik Kecamatan, rehab berat dan rehab total gedung

SDN/SMPN, pembangunan gedung SMA baru, SMA Unggulan serta SMK Kelautan, dan peningkatan pelayanan keluarga miskin (JPK-Gakin).

Sedangkan alokasi anggaran untuk masing-masing program dan fungsi menurut 8 (delapan) bidang pembangunan adalah sebagai berikut :

a. Bidang Hukum, Ketentraman Ketertiban Umum dan Kesatuan Bangsa

1) Fungsi Hukum

- a). Penyusunan Raperda, Penyempurnaan Perda, dan Revisi Undang-Undang No. 34 tahun 1999.
- b). Gema Hukum Ibukota Jakarta dan Penyuluhan Hukum terpadu.

2) Fungsi Ketentraman, Ketertiban dan Penanggulangan Bencana

- a). Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Personil Tramtib.
- b). Peningkatan pemberdayaan masyarakat di bidang tramtib dan penanggulangan bencana, serta peningkatan balakar di masyarakat.
- c). Pengembangan *crisis centre*, peningkatan keterampilan dan kemampuan aparat.

3) Fungsi Kesatuan Bangsa

- a). Peningkatan kerukunan kehidupan masyarakat Jakarta.
- b). Peningkatan kesadaran demokrasi dan HAM.

b. Bidang Pemerintahan

1) Fungsi Pemerintahan Umum

- a). Pengembangan dan Penataan Administrasi Pemerintahan Kotamadya/Kabupaten Adiministrasi, Kecamatan dan Kelurahan.
- b). Perumusan Kebijakan dan Pemantapan Pelaksanaan Otonomi Daerah.
- c). Koordinasi dan Fasilitasi Pelimpahan Kewenangan.

- d). Pengembangan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Wilayah.
- e). Peningkatan Manajemen Pemerintahan Kelurahan dan Kecamatan Provinsi DKI Jakarta.

2) Fungsi Aparatur

- a). Pengembangan dan Pengelolaan SI Pegawai.
- b). Pengelolaan Administrasi Kepegawaian.
- c). Penempatan dan Pendayagunaan Pegawai.
- d). Penyusunan Kebijakan dan Penyempurnaan Peraturan Kepegawaian.
- e). Pengelolaan Kesra Pegawai.
- f). Pembinaan Administrasi Kepegawaian.

3) Fungsi Perencanaan dan Pengawasan

- a). Penyusunan rencana tindak (*action plan*) fungsi-fungsi strategis bidang ekonomi, penyusunan APBD, penyusunan rencana tahunan, pengembangan informasi pembangunan daerah, penyusunan *master plan* dan rencana aksi fungsi-fungsi strategis bidang aparatur, dan bidang SPKLH, penyusunan rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang, monitoring dan pengendalian pembangunan daerah, peningkatan kualitas penelitian penunjang kebijakan, pendokumentasian referensi penelitian, pengembangan SDM Bapeda dan pembenahan arsip Bapeda.
- b). Pengembangan indikator Renstrada, *Spending Assesment* serta Kerjasama Penelitian dengan Perguruan Tinggi.
- c). Peningkatan pengawasan dan penanganan kasus KKN, peningkatan dan pengawasan/pemeriksaan reguler dan pengembangan SDM/Pelaksanaan Diklat Fungsional Auditor.

4) Fungsi Pengelolaan Keuangan Daerah

- a). Peningkatan proses dan mekanisme kerja pelayanan keuangan daerah, penyempurnaan sistem keuangan daerah, pembinaan administrasi keuangan daerah.

- b). Peningkatan fasilitas layanan pendapatan daerah, peningkatan penatausahaan dan kualitas SDM, peningkatan pelayanan PKB dan BBN-KB Jakarta Timur, peningkatan tertib administrasi dengan sistem informasi PKB dan BBN-KB, peningkatan penerimaan PKB dan BBN-KB, peningkatan layanan unit PKB dan BBN-KB Jakarta Barat dan Jakarta Pusat, peningkatan pengawasan pemeriksaan pajak daerah, peningkatan penagihan pajak daerah, peningkatan sosialisasi dan penyuluhan, peningkatan pen.gendalian kinerja pendapatan daerah, peningkatan pengendalian pemungutan dan penerimaan pendapatan daerah, peningkatan dan perencanaan dan pengembangan, peningkatan sistem informasi pendapatan daerah, peningkatan koordinasi penerimaan bagi hasil pajak, peningkatan potensi pendapatan daerah, peningkatan pelayanan pajak daerah terpadu.

5) Fungsi Sistem Informasi

- a). Pembangunan dan pengembangan sistem informasi untuk mendukung pelayanan publik, pembangunan dan pengembangan sistem untuk mendukung manajemen pemerintah, kegiatan penunjang operasional, pembangunan dan pengintegrasian berbagai sistem informasi lintas sektoral, pengembangan dan optimalisasi sarana dan prasarana teknologi informasi, pengembangan kawasan aparatur dan masyarakat dalam bidang teknologi informasi.
- b). Sosialisasi kebijakan dan program pembangunan daerah melalui media massa.

c. Bidang Ekonomi

1) Fungsi Pariwisata

- a). Tersedianya *master plan* kebijakan sektor pariwisata DKI Jakarta.

- b). Meningkatnya jumlah serta kualitas produk/obyek wisata.

2) Fungsi Industri dan Perdagangan

Terjaminnya ketersediaan dan kelancaran distribusi barang yang memenuhi kebutuhan masyarakat.

3) Fungsi Pengembangan Usaha Daerah

- a). Tersusunnya standarisasi dan sistem SDM BUMD sehingga mampu meningkatkan SDM BUMD di lingkungan Pem.erintah Provinsi DKI Jakarta.
- b). Terselenggaranya *Jakarta Investment Forum*.
- c). Tersusunnya peta kawasan unggulan (*blue print*) investasi di Provinsi DKI Jakarta.
- d). Terbentuknya sistem informasi manajemen aset komersial daerah.
- e). Tersedianya hasil penilaian pelaksanaan perjanjian kerjasama aset eks BPIP Jaya.

4) Fungsi Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi

- a). Terciptanya usaha skala mikro yang sehat dan dinamis.
- b). Tertatanya para pedagang kaki lima ke lokasi binaan (lokbin).
- c). Tertibnya para pedagang kaki lima.

5) Fungsi Peternakan, Perikanan dan Kelautan

Pembangunan pada Fungsi Peternakan, Perikanan dan Kelautan antara lain diarahkan pada peningkatan pendapatan masyarakat kelompok usaha peternakan, perikanan.

6) Fungsi Pertanian dan Kehutanan

- a). Meningkatnya produksi hortikultura bernilai tinggi.
- b). Meningkatnya produksi tanaman hias.
- c). Meningkatnya pemanfaatan lahan dan teknologi pertanian lahan sempit.
- d). Terselenggaranya pengadaan, distribusi dan penyaluran bahan pangan yang efisien dan efektif.

d. Bidang Pendidikan dan Kesehatan

1) Fungsi Pendidikan

- a). Peningkatan Pemerataan dan Kesempatan Memperoleh Pendidikan Dasar.
- b). Penyediaan Sistem Manajemen Pembiayaan Pendidikan Dasar.

2) Fungsi Kesehatan

Peningkatan layanan kesehatan dengan prioritas pada keluarga miskin (gakin).

e. Bidang Kependudukan Dan Ketenagakerjaan

1) Fungsi Kependudukan

Pengembangan sistem komputerisasi kependudukan dan catatan sipil.

2) Fungsi Ketenagakerjaan

- a). Penempatan tenaga kerja.
- b). Pembinaan dan pelayanan Tenaga Kerja Indonesia.
- c). Pelatihan ketrampilan kerja di seluruh BLKD Provinsi DKI Jakarta (5 BLKD dan 2 BLK Khusus), yang meliputi pelatihan ketrampilan las, montir mobil dan sepeda motor, operator dan programmer komputer dan pelatihan keterampilan lainnya yang dibutuhkan dunia industri.

f. Bidang Sosial Budaya

1) Fungsi Keagamaan

Terlaksananya intensif pembinaan keagamaan ditingkat RT/RW sehingga terwujud kerukunan antar umat beragama.

2) Fungsi Kesejahteraan Sosial

- a). Pembinaan kesejahteraan anak, remaja, keluarga dan lanjut usia. Indikator yang ingin dicapai meningkatnya perlindungan dan pelayanan sosial terhadap usia lanjut, penyandang cacat dan anak terlantar.
- b). Peningkatan sarana prasarana pemakaman.

3) Fungsi Pemberdayaan Masyarakat

- a). Peningkatan ketahanan masyarakat Kelurahan.
- b). Peningkatan penanggulangan kemiskinan.
- c). Pencegahan tingkat kerawanan sosial di lingkungan masyarakat.

4) Fungsi Pelestarian Budaya Dan Permuseuman

- a). Perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan seni budaya.
- b). Peningkatan kreatifitas dan kualitas pelaku seni budaya.
- c). Peningkatan manajemen pembinaan dan pelayanan seni budaya dan permuseuman.
- d). Pengawasan Benda Cagar Budaya (BCB) dan kegiatan seni budaya.

5) Fungsi Olahraga dan Kepemudaan

- a). Pemberdayaan organisasi kepemudaan dan pramuka.
- b). Pengembangan aktivitas kepemudaan.
- c). Pembinaan olahraga prestasi.

g. Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

1) Fungsi Sumber Daya Alam

- a). Pengembangan dan pengelolaan data geologi struktur bawah tanah.
- b). Pengembangan dan pengelolaan perusahaan ESDM.

2) Fungsi Lingkungan Hidup

- a). Program Pantai Bersih Laut Lestari (PBLL), kali bersih, peningkatan sarana dan prasarana laboratorium lingkungan, pengembangan, pelestarian dan pemulihan sumber daya air, peningkatan peran serta masyarakat untuk pelestarian air, peningkatan pengendalian udara bersih dari sumber bergerak dan tidak bergerak sebagai implementasi Perda nomor 2 tahun 2005.
- b). Pembinaan dan pengendalian teknis AMDAL.
- c). Penyusunan dan pengembangan program pertamanan.

- d). Perencanaan/perancangan taman kota.
- e). Refungsionalisasi taman dan jalur hijau.

3) Fungsi Kebersihan

Tersedianya sarana dan prasarana kebersihan dan tersedianya lokasi ITF (*Intermediate Treatment Facility*) untuk pengolahan sampah dengan teknologi tinggi dan penanganan yang tepat guna.

h. Bidang Sarana dan Prasarana Kota

1) Fungsi Kelengkapan Kota

- a). Pembangunan sarana jaringan utilitas terpadu di jalan Rasuna Said dan penataan jaringan utilitas di kawasan Medan Merdeka.
- b). Pembangunan penerangan jalan dalam rangka menunjang pembangunan Busway.
- c). Pembangunan sarana air limbah di Pondok Kelapa, Malakasari, kantor pemerintahan dan pemulihan pencemaran air di Waduk Melati, Waduk Tomang.

2) Fungsi Tata Air

- a). Pembangunan dan pemeliharaan sarana pengendali banjir serta irigasi termasuk kegiatan *dedicated* seperti penataan Kali Angke, pembebasan tanah Banjir Kanal Timur serta penurapan Banjir Kanal Barat.
- b). Pembangunan pemeliharaan situ-situ dan pemeliharaan saluran-saluran penghubung dan mikro/permukiman yang tersebar di lima wilayah kotamadya.

3) Fungsi Perhubungan

- a). Perbaikan jalan arteri sekunder, perbaikan jembatan arteri/kolektor, perencanaan dan kajian pengembangan prasarana jalan dan jembatan, laboratorium konstruksi, perbekalan dan peralatan besar konstruksi, pembangunan dan peningkatan simpang tak sebidang, pembangunan dan peningkatan jalan arteri/kolektor (busway), pengadaan lahan

jalan, flyover dan jembatan, perencanaan teknik jalan, jembatan, rekayasa lalu lintas dan pengembangan teknologi, pembenahan simpang sebidang, pembangunan dan peningkatan jembatan arteri/kolektor, pembangunan dan peningkatan jalan arteri/kolektor, pengadaan lahan jalan, flyover, dan jembatan (subway), pembangunan dan peningkatan trotoar.

- b). Pengendalian lalu lintas, pengawasan dan operasi penertiban angkutan jalan, pengembangan sarana dan fasilitas perhubungan laut, pelaksanaan dan pemeliharaan sarana dan fasilitas angkutan jalan rel, pelaksanaan dan pemeliharaan sarana dan fasilitas perhubungan laut, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan fasilitas pendukung lalu lintas jalan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan fasilitas pendukung sarana dan prasarana angkutan umum, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana pengaturan lalu lintas, pelaksanaan dan pemeliharaan sarana dan fasilitas perhubungan udara, pengembangan dan pembinaan usaha angkutan umum, pengembangan dan pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor, pengembangan dan pengendalian terminal bus dan mobil barang, pelaksanaan dan pemeliharaan sarana dan fasilitas penyeberangan, peningkatan dan penunjang SDM perhubungan, perencanaan dan evaluasi sarana dan prasarana perhubungan, pelaksanaan dan pemeliharaan sarana dan fasilitas pos dan telekomunikasi.
- c). Pengembangan MRT/angkutan massal, penertiban, pengawasan dan pengendalian jalur busway, kegiatan untuk menunjang subway, kegiatan pembangunan sarana/prasarana dan kegiatan lainnya untuk menunjang busway, pembangunan prasarana penunjang pool busway, pengembangan busway, peningkatan disiplin pengemudi, pengguna jasa angkutan dan pemakai jalan lainnya, pengembangan pelayanan angkutan laut, pengembangan

pelayanan penyeberangan, peningkatan SDM perhubungan, pengembangan kualitas layanan angkutan umum, operasional dan pelayanan perhubungan laut, pembangunan pelabuhan Muara Angke dan operasi dan pemeliharaan sarana UPT penyeberangan laut.

4) Fungsi Perumahan dan Permukiman

Terbangunnya rumah susun di lokasi Kapuk Muara, Marunda, Pegadungan, Jatirawasari dan Pondok Bambu, perbaikan rumah susun Petamburan dan Karang Anyar, pembuatan *advise planning*, pekerjaan Amdal, sosialisasi panduan pengelolaan dan tertib penghunian rumah susun, serta sosialisasi pengelolaan rusun yang dibangun oleh pengembang.

5) Fungsi Tata Ruang

- a). Penguatan Organisasi Ketatakotaan.
- b). Tersedianya tambahan peta dasar operasional pelayanan. tersedianya konsep pencapaian standar *green ratio*, *water ratio* dan *road ratio*, terlaksananya observasi rencana ruang makro kota.
- c). Tersedianya *trace jalur bus priority* (koridor 7 dan 8).
- d). Tersusunnya pedoman pembuatan rencana tata ruang bawah tanah.

6) Fungsi Tata Bangunan

- a). Pembangunan gedung Kantor Walikotamadya.
- b). Pembangunan gedung Kantor Samsat/Sudin Pendapatan Daerah Kotamadya.
- c). Pembangunan gedung Prasada Sasana Karya Provinsi DKI Jakarta.
- d). Pembangunan gedung Blok B & D Gedung Arsip Provinsi DKI Jakarta.
- e). Pengembangan gedung Balaiikota Provinsi DKI Jakarta.
- f). Pembangunan gedung PKP Provinsi DKI Jakarta.
- g). Peningkatan kualitas dan keandalan bangunan tugu Monas.
- h). Pembangunan fasilitas gedung *Jakarta Islamic Centre*.